

ABSTRACT
CONFERENCE PROCEEDING

The 1st International Conference
on The Dynamics and Empowerment
of Rural Society in Asia

Semarang, April 29, 2016

Organized by:



Organized by Faculty of Social Sciences, Semarang State University Indonesia, collaboration with Punjabi University Patiala India, Flinders University Adelaide Australia, and Universiti Sabah Malaysia

ABSTRACT
CONFERENCE PROCEEDING

**The 1st International Conference on Dynamic
and Empowerment of Rural Society in Asia**

Semarang, 29th April, 2016

Organized by:
Faculty of Social Sciences, Semarang State University Indonesia,
collaboration with Punjabi University Patiala India, Flinders University Adelaide Australia,
and Universiti Sabah Malaysia

INTRODUCTION

Thank God we pray the presence of God Almighty for all the grace and mercy so that the book of abstracts can be arranged. This book aims to help the management of the 1st International Conference on The Dynamics and Empowerment of Rural Society in Asia which organized by Faculty of Social Sciences, Semarang State University.

Overall, there are 77 papers that have been submitted to the committee that covers such themes : Empowerment of Rural Society, Applied Technology For Rural Society and Implementation of Rural Policy.

In this occasion, the committee would like to thank all the participants of the conference, and we hope that the event may bring benefits for all.

April 29th, 2016
Committee

TABLE OF CONTENT

INTRODUCTION TITLE OF ABSTRACT RUN DOWN

TITLE OF ABSTRACT

RURAL SOCIETY AND ECONOMIC CHANGE IN MALAYA: A HISTORICAL PERSPECTIVE IN THE NINETEENTH CENTURY A Rahman Tang Abdullah	1
EXPLORING DAYAK GOVERNANCE CAPACITY IN REGIONAL AUTONOMY Johan Richard Weintré	3
GENDER EQUALITY AND RELIGIOUS PRACTICES Rajinder pal Singh	4
THE IMPACT OF CAPITALISM PLANTATION TOWARD PEASANT ECONOMY IN JAVA THE END OF NINETEENTH TO THE EARLY TWENTIETH CENTURY Wasino	5
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GUNA PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN KE SITUS DAN MUSEUM TRINIL NGAWI Abraham Nurcahyo, Soebijantoro, Anjar Mukti Wibowo	6
EMPOWERMENT BASED "KAMPOENG PINTAR" TO INCREASING PRODUCTIVITY RURAL COMMUNITIES IN JEPARA Ade Putri Royani, Nisa Hafizhotus Syarifa	7
FILOSOFI WUAT WAI DI MANGGARAI Adrianus M. Nggoro	8
PEMBERDAYAAN LANSIA MELALUI KARANG WERDA DI DESA NGLEGOK KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR Afiyatur Rosidah, Lusiana Devika F.S., Rifqi Firda S.	9
FORUM ANAK DESA SEBAGAI PERCONTOHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) DI DESA KESAMBI KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG Akil Fitra Sholakodin	10
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JAMBAAN YANG LAYAK SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN KEBERSIHAN DAN KESEHATAN WARGA DUSUN PUCUNG DESA NGRENCAK KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK Ali Hidayah, Diah Permatasari, Theresia Edeltrudis Sato	11

PEMUDA BERDAYA, DESA SEJAHTERA : ORGANISASI KARANG TARUNA "KARYA MANUNGGAL" SEBAGAI WADAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA KAWENGEN, KABUPATEN SEMARANG Alfisyahr Izzati	12
PENCANANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA SEBAGAI WUJUD PENANGGULANGAN MORTALITAS DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI Angga Unita Kiranantika	13
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG EKONOMI MELALUI KELEMBAGAAN LOKAL (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Anik Susanti, Nyimas Nadya Izana	14
P3L SEBAGAI USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA Anis Mirna Defi, Dilla Fadila, Nadhilah Dwi Yulianita	15
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MODAL SOSIAL DI DESA ZONA MERAH KABUPATEN PURWOREJO Anita Rinawati	16
PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DESA MULYOAGUNG AKIBAT PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MELALUI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) Annisa Dwi Apsari, Lely Viki Fatmala, Tesalonika Taradebora	17
MEMBANGUN MODEL SINERGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA SUKOHARJO KABUPATEN PATI Antari Ayuning Arsi, Asma Luthfi, Harto Wicaksono	18
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BLUMAH KECAMATAN KENDAL BERBASIS EKOWISATA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN Apik Budi Santoso, Ananto Aji, Edi Kurniawan	19
OPPORTUNITIES AND THREATS IN DEVELOPING TOURIST VILLAGE FOR INDEPENDENT AND EMPOWERED RURAL COMMUNITY Argyo Demartoto, R.B Soemanto, Siti Zunariyah	20
MENCIPTAKAN GENERASI MUDA TANPA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN SITUBONDO Arif Aminullah Prayono, Alfanda Rahmatullah	21

PEMBERDAYAAN PETANI DALAM MENENTUKAN MUSIM TANAM TEBBAKAU TEROPTIMAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG Ariyani Indrayati	22
PERAN DESA ADAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU DAYAK BA'NYADU DESA ANTAN RAYAN KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK, KALIMANTAN BARAT Basuki Wibowo	23
INDUSTRI RAKYAT DI PEDESAAN TEGAL AKHIR ABAD KE-20: MENANGKAP KAIL MENDAPAT UMPAN C. Santi Muji Utami	24
DAMPAK PERTAMBANGAN PADA HAK ULAYAT TANAH MASYARAKAT ADAT SUMURI DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT Ceni Febi Kurnia Sari, George Mentansan	25
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF SEBAGAI WUJUD PEMBERDAYAAN ANAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG Deni Kurnia Sari, Mei Rita Kumala, Rina Natalia	26
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA Didik Gunawan Suharto	27
COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH INCREASING PUBLIC PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT VILLAGE Eko Handoyo	28
OPTIMIZING RURAL COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH INTEGRATING PUAP, GAPOKTAN, AND DEMAPAN PROGRAMS Eko Santoso, Umi Erniasih	29
COMMUNITY DEVELOPMENT WITH TECHNOLOGY APPLICATION OF PATCHOULI OILPURIFICATION AS WELFARE IMPROVEMENT CRAFTS MEN IN BELIK DISTRICT PEMALANG CITY Emas Agus Prastyo Wibowo	30
MEMBANGUN DESA TANGGUH BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DETEKSI DINI BAHAYA BANJIR DAS BERINGIN KOTA SEMARANG) Emi Suharini, Ariyani Indrayati, Edi Kurniawan	31
RURAL DEVELOPMENT SUSTAINABLE FORESTS BASED ON AGROFORESTRY Eva Banowati	32
POLA ASUH ORANGTUA DI DESA TERHADAP MORAL DAN PSIKOLOGI ANAK Fatmah Zahra, Ratna Setia Nugraheni	33

THE EMPOWERMENT OF POKDAWIS (KELOMPOK SADAR WISATA / THE GROUP CONSCIOUS TOURIST) SUKO MAKMUR AGAINST THE DEVELOPMENT OF THE VILLAGE TOURIST KANDRI Ferani Mulianingsih	34
POTENSI LOKAL, PEMBERDAYAAN DAN TANTANGAN MONETESASI: PENGALAMAN RINTISAN DESA WISATA KARANGASEM, BANTUL Ghifariyuristiadhi	35
ANUT GRUBYUG: TAKLUKNYA PETANI PADA MOBILISASI PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PADA PROYEK PENGEMBANGAN JARAK PAGAR SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF DI KECAMATAN TEPUS, GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA) Gunawan	36
PENGARUH KONVERSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DI DAERAH PINGGIRAN KOTA SEMARANG Hariyanto, Imam Buchori	37
THE DYNAMICS OF COMMUNITY EMPOWERMENT BASED ON LOCAL RESOURCES IN JOJOGAN TOURISM VILLAGE, DIENG PLATEAU, CENTRAL JAVA Hartati Sulistyono Rini	39
ANALISIS POTENSI DAN MASALAH KELURAHAN KANDRI UNTUK MENJADI DESA WISATA Heri Tjahjono, Aprillia Findayani	40
PEMEKARAN DAERAH DAN TERBENTUKNYA KELAS MENENGAH (BARU) PAPUA I Ngurah Suryawan	41
MICROPOLITICS OF SMALL FARMING : A SOCIO-LEGAL ANALYSIS OF FARMER'S RIGHTS AND FOOD PIRACY IN INDONESIA Ika Riswanti Putranti, Ari Pradhanawati	42
PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP PERUBAHAN SIKAP ANAK SD Inka Eva Umulaili	43
KAJIAN KEBERDAYAAN PETERNAK SAPI PERAH DENGAN PENDEKATAN KAPABILITAS DI WILAYAH PERDESAAN L.V. Ratna Devi S.	44
MODEL PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA BERDAYA DAN BERBUDAYA (STUDI KASUS DI KELURAHAN-KELURAHAN KOTA SEMARANG) Maman Rachman	45

EXISTENCE IN THE VILLAGE LANTING HOUSE CAPE COMMERCIAL DISTRICT NANGGA PINOH MELAWI WEST KALIMANTAN Mardiana, Emi Tipuk Lestari	46
TOWARDS THE VILLAGE BUILDING POST-APPLICABILITY OF LAW VILLAGE Martien Herna Susanti	47
ENERGI SOSIAL DI PEDESAAN DALAM MEMBERDAYAKAN PEMBANGUNAN DI DESA (PENELITIAN PADA BEBERAPA DAERAH PEDESAAN DI KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR) Masrukhi, Indah Sri Utari	48
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PERSEN KECAMATAN GUNUNG PATI KOTA SEMARANG Meddiati Fajri Putri	49
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MISKIN PEDESAAN MELALUI PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (STUDI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN DI DESA JOMBOR, KECAMATAN TUNTANG, KABUPATEN SEMARANG) Mintarsih Arbarini	51
DINAMIKA EKONOMI MASYARAKAT DESA SENTRA INDUSTRI (KASUS DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS) Moh Solehatul Mustofa	52
KONTRIBUSI PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Muh. Sholeh	54
KONFLIK NELAYAN DI DESA-DESA PESISIR UTARA JAWA TENGAH: SEBUAH KAJIAN HISTORIS Mukhamad Shokheh, Ngabiyanto, Syaiful Amin	55
PENGEMBANGAN PUSAT PERDAGANGAN DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA DI PULAU SEBATIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA Nugroho Eko Putro	56
ANALYSIS ON SUSTAINABILITY EMPOWERMENT TO THE COMMUNITY AROUND THE HISTORICAL SITE KARANGKAMULYAN CIAMIS, WEST JAVA IN REGIONAL AUTONOMY ERA Nuriyanti	57
UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BURUH PEMETIK TEH DI KAWASAN PERKEBUNAN TEH TAMBI WONOSOBO Nuzul Fatimah	58

STRENGTHENING HUMAN RESOURCES THROUGH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TO BOOST RURAL ECONOMIC GROWTH Pentarina Intan Laksmiawati	59
CREATIVE AGRICULTURE IN DRY LAND KARST REGION IN PUCUNG VILLAGE, EROMOKO, WONOGIRI Priyono, Choirul Amin, Arif Jauhari	60
VILLAGE POTENTIAL BASED OF TOURISM IN THE REGENCY OF SEMARANG, CENTRAL JAVA PROVINCE Puji Hardati	61
INTERVENSI KELUARGA PRASEJAHTERA MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN POSDAYA DI DESA BERGAS LOR Puji Lestari	62
INCENTIVE STRATEGY TO SUPPRES THE PRODUCTIVE FARM LAND CONVERSION RATE IN DEPOK SUB DISTRICT OF SLEMAN REGENCY Rahesli Humsona, Sri Yuliani	63
DESA VOKASI DAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI ANALISIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DI DESA NGABAB KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG) Rezka Arina Rahma	64
MODEL IMPLEMENTASI DESA ARGO-EKOWISATA DALAM MEMBENTUK KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN AMPELGADING) Rohmatul Khasanah	65
ANALIZE CULTURE CONSERVATION THROUGH THE WAYANG SUKET DESIGN DEVELOPMENT AS A CULTURAL ATTRACTIONS IN VILLAGE TOURISM IN CENTRAL JAVA Salim Zahid	66
INTERNET MASUK DESA (STUDI KASUS PEMANFAATAN WIFI DI DESA KARANGREJO KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR) Salsabeeputri, Deaamalia, Ari Rizky	67
KEARIFAN MASYARAKAT CANGKRINGAN DALAM MEMAHAMI TANDA-TANDA BENCANA ERUPSI MERAPI Septian Aji Permana, Dewi Liesnoor Setyowati, Juhadi	68
DINAMIKA PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF KONFLIK Sidik Puryanto, Didi Susanto	69

MITIGATING THE EFFECT OF OCCUPATION SHIFT FROM AGRICULTURAL TO MINING SECTOR SURROUNDING PT ANTAM PONGKOR Sigit Pranawa, Totok Mardikanto, Drajat Tri Kartono, RB Soemanto	70
PENGEMBANGAN DESA MADANI MELALUI BUMDES RUMAH SAWAH Slamet Setioboro	71
PEMANFAATAN LIMBAH KAYU MENJADI "VATIMAH" (VARIOUS TIMBER WASTE HANDICRAFTS) SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PINGIT KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG Sofi Mardiyati, Saiful Anwar	72
PARTISIPASI FORUM ANAK DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN DEMOKRASI Sri Yuliani, Rahesli Humsona, Sudaryanti	73
COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Sudharto P. Hadi	74
FORMS OF SOCIAL INTERACTION BETWEEN DISCIPLES OF RELIGIONS IN RURAL COMMUNITY Thriwaty Aرسال, Sumartono	75
PEMBERDAYAAN P2BO (PROGRAM PENGENALAN BUDAYA OSING) DI DESA SAMBIREJO, KECAMATAN BANGOREJO, KABUPATEN BANYUWANGI Tia Mariati, Husnul Khotimah, Afriska Kusniasari	76
FULFILMENT OF GENDER NEEDS AND POVERTY REDUCTION: A CASE STUDY IN VILLAGE GOVERNANCE Tiyas Nur Haryani, Azyani Zulfatindayu, Puput Putri Setyowati	77
EMPOWERING POOR WOMEN IN RURAL JAVA. INDONESIA THROUGH ENTREPRENEURIAL EDUCATION Yayuk Mardiaty	78
THE CHINESE ROLE IN RURAL YOGYAKARTA 1850 - 1930: A HISTORICAL PERSPECTIVE Yudi Prasetyo	79
PEMBERDAYAAN INDUSTRI BORDIR SEBAGAI DUTA BUDAYA ACEH Yuli Kusdiarni	80
PEMBERDAYAAN DAN PERUBAHAN STIGMA MASYARAKAT (STUDI KASUS DI "KAMPUNG PREMAN" BADRAN YOGYAKARTA). Yuli Setyowati	81
PEMBERDAYAAN PETANI JAGUNG MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Yuniar Aviati Syarief	82

Micro-politics of small farming : a socio-legal analysis of farmer's rights and food piracy in Indonesia

Ika Riswanti Putranti, Ph.D

Departemen International Relations Faculty of Social Sciences Diponegoro University

Email: ikarisp@gmail.com

Dr. Ari Pradhanawati

Department of Business Administration - Faculty of Social Sciences Diponegoro University

Email: pradhanawatiari@rocketmail.com

Abstract

The small farming still plays crucial role within country economic, where most of the inhabitants are depend their daily life to agriculture. National political configuration has brought some significant to the agriculture development. In domestic level policy of local autonomy has change the landscape of agricultural policy which different from one region to another region. The local advantage and local culture placed as the foundation to develop the small farming in region. Whilst in the international level, the free trade agreement has change the market landscape for local agriculture product. Coping with these two circumstances dimensions two issues were raised related to farmer rights and food piracy whereas micropolitic of small farming able to manage such issues. Socio-legal approach will be used to strip up the micropolitic of small farming due to its focus of traditional farmers and traditional agricultural system.

Keywords : Micropolitics, farmers rights, food piracy, Indonesia.

1. Introduction

For centuries until today Indonesia, economic activities mostly depend on agriculture sector, whereas it has significant contribution to national GDP. In 2013, as noted by national central statistic bureau, Indonesia has 26, 14 millions farming households. Its consist of 17,73 million food crops households, 10, 60 million horticultures households, 12,77 million plantation households, 12,97 million animal husbandry households, 1,19 million fish farming households, 0,86 million fisheries households, 6,78 forestry households, and 1,08 millions agricultural service households. The number of small farming households are 14,25 million households or 55,33 percent from the total number of farmers. The total number of farmers is 31,70 million people, whereas mostly concentrated on food crops subsector as many as 20,40 million people.

Politics has a significant influence to the development of agriculture sector. In this point, the agriculture policy is determined by the configuration of the political views. However, in recent times the external factors, such as the regime of multilateral trading system, gives strong influence to the internal policy of agriculture. Agriculture developments agenda directed to increase the agriculture production in order to accomplish the domestic interest of food security and industries, to enhance agricultural export performance and product competitiveness, to improve the farmers income, and to open up more job opportunities.

Besides, it dominated small farming, most of farmers in Indonesian are traditional farmers. In this regards, most of Indonesian farmers use the traditional way that inherited from their ancestor. The traditional ways is starting from cultivate their agriculture land, processed their agriculture product until selling agriculture product to the market. Traditional farmers usually sell their product to the traditional market of intermediary trader. Limited access to the market either domestic or foreign due to the market illiteracy, where traditional farmers only focusing in cultivate their land and producing agriculture product without anticipating the market destination.

Some farmers traditional in certain areas they have their own way marketing their product, for instance establishing their own trade system based on their local wisdom and traditions. Local farmers unions usually consist of some farmers group, which planting certain agriculture products, thus they established an agreement amongst themselves to create their own trade system. This trade system aimed to be price buffer for the agriculture product. The system used closed procurement, where the farmer would sells their agriculture product to the trader who offers the highest price. This method is used to avoid the falling price in the domestic market, maintaining farmer bargain position in the market, and keeping the product quality.

The implementation of market economy after 1997 crises and impact of multilateral free trade agreement has brought significant impact to the Indonesia agriculture. Back in the 1980s to 1990s Indonesia has succeed with agriculture surplus production, where it based on traditional farmers. Along

with the recent development on global economy, the situation is changing rapidly, thus its caused the traditional farmers hardly to cope with the tense competition either with local farmers of foreign farmers.

With regard to local autonomy, a new challenge was created in poverty reduction and economic development in which there was fragmentation and different policies in certain sectors from region to region. Decentralisation policy was defined as conferring some of the central government competences to the local government in order to deliver welfare effectively and to give greater authority to the regions managing their specific development based on local needs and characteristics. Therefore, local governments expected be able to initiate policies and bring their people into a better life.

As one of the economic backbone, farmer rights (in this regard traditional farmers) still marginalized within agriculture industry. Most of farmers are living in the poverty without any certainty of income because they do not have bargain position power in the market. In addition, their access to the market is very limited, which mostly only limited to the traditional market or traditional intermediary traders. Farmer rights also related to the intellectual and property rights, in this regards patent, trademark, and geographical indications. Some of traditional farmers based on their knowledge and experience has created some excellent agriculture product, especially organic agriculture product. Therefore, issue of IPRs and product traceability becomes important to be raised, even though until today

it does not get a serious concern from the related stakeholders. Economic injury could be emerged due to fraud related to IPRs and product traceability, the term would be used in this study is food piracy.

The term of food piracy is created from the demonstration of Italian farmers against the fraud conducted to their products. What it so called as food piracy? Food piracy is using the brand of certain product for others imitation products or mixed up original product with the unoriginal. Food piracy also can be conducted by deprived the product traceability by relabeling product with the other brand of origin. This conduct intended to raise the profit by certain actors, on the other hand it can undermining the profit of small farming. Indonesia is vulnerable to food piracy conduct due to its position in the free trade area where traceability is really matter to be a compulsory requirement for a product to enter the market.

Micropolitic in agriculture plays very interesting part especially related to small farming in which farmers, stakeholders, NGOs, and business actors are struggling to dealing with the issue of farmers rights and food piracy in order to come up with the solutions. Due to its minor voices in spite of it majority number, small farming still manage traditionally and located in the remote area where most of its farmers are have no higher education background (many of them are illiterate) and do not have sufficient knowledge about what call as farmer rights and food piracy. However, their local wisdom and their traditional system could give a protection against food piracy and protecting their rights as farmers.

This paper focused on the traditional farmers in remote area where it has high number of poverty and illiteracy but having an excellent agriculture products. In addition, they already establish its traditional trade system. In sum up this paper is aimed to portray the micropolitic of small farming toward farmer rights and food piracy, a socio-legal approach will be used to analyst various factors that potentially influencing involved actors and stakeholders.

2. Micropolitics

Micropolitics defined as the politics internal of organisations.¹ Michel Foucault's in his works 'governmentality', explains how power is being manipulated and negotiated by different actors and organization.² The aims why the study of micropolitics comes into existence, it has the same logic why the microeconomic exist. The economist arguing that studying micro-level to portray the "economic reality", vice versa using the micropolitic to obtain the political reality at the micro level, where it can produce the solution that are more practical.³ Micropolitic is very useful to mapping out how the decision, policy, and action are made from closer distance.⁴

¹ Smeed, Judy L. and Kimber, Megan and Millwater, Jan and Ehrich, Lisa C. (2009) Power over, with and through : another look at micropolitics. *Leading & Managing*, 15(1)., pp. 26-41

² Robinson, D.F. (2006) Governance and Micropolitics of Traditional Knowledge, Biodiversity and Intellectual Property in Thailand: Research Report. National Human Rights Commission of Thailand, Bangkok, UNSW and University of Sydney.

³ Madsen Pirie. (1988). *Micropolitics*, Adam Smith Institute London, ISBN 0-7045 31-03-8, p. 74.

⁴ Madsen Pirie. (1988). *Op. Cit.*, p. 75.

From the micropolitics perspective, policies formulation based on the public choices, where the behavior of the individuals and groups involved taking into account.⁵ At this point, micropolitic sets up policies to create resistance against some circumstances that could endanger its micro existence. The models of the micropolitic practiced is different from one area to another area. Such circumstances were caused that every area has a problems that represented it characters or situation.⁶ According to Pirie, that “the world might be improved if there were less government involvement in the economic processes, less regulation, and less pre-emption of the funds which people can allocate to their preferences”.⁷ Action in limited areas or on limited groups deals with minorities, and it is fundamental to micro politics that minorities have more power than majorities. They are able to identify their benefit more immediately, and to isolate its value.⁸

3. Farmers’ Rights

Farmers’ Rights always associated with definition conceive in some international agreement on the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture or convention of bio diversity. The issue of farmers’ Rights in international arena can be traced down back to 1980s. In 1989, farmers’ rights were for the first time formally recognized by the FAO Conference. Both of these international instruments contain issues of

⁵ *Ibid.*, p. 75.

⁶ Madsen Pirie. (1988). *Loc. Cit.*, p. 77.

⁷ *Ibid.*, p. 77.

⁸ Madsen Pirie. (1988). *Op. Cit.*, p. 124.

intellectual property rights. With regard to such issues, it is believe that traditional farmers have their own concepts of intellectual property rights. The communality character of farmers considered contributing to such concept. Farmers' rights viewed as collective rights in a broad sense rather than rights of individual farmers or communities. On the other hand, farmers' rights protection has facing some obstacles such as political weakness of the traditional farming sector, urban and consumer demand for low cost commodities, and the need to promote agricultural development.⁹

The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture govern provisions on farmers' rights, and require states contracting parties to implement the principle of the treaties. The measures to protect and promote farmers' rights are suggested but the implementation given to the states. The preamble of the International Treaty highlights the necessity of promoting farmers' rights at the national as well as international levels.¹⁰

4. Study Case : Sistem Lelang Tertutup Cabai Merah di Kabupaten Kulon Progo.

⁹ Stephen B. Brush., (2005), Farmers' Rights And Protection Of Traditional Agricultural Knowledge, CAPRI Working Paper No. 36, International Food Policy Research Institute, pp. 25-29.

¹⁰Regine Andersen., (2005), The History of Farmers' Rights, The Fridtjof Nansen Institute.

Selected case studies in this paper is the auction of agricultural products in Kulon Progo chili. Red chili is one commodity that has economic value strategic local and national level. Commodities red pepper has a Consumer Price Index (CPI) was 0.45 per cent in the base year 2007, while in DIY red chili inflation of 0.16 percent. But once the price of red chilli in the market is very volatile because consumption patterns are more likely to enjoy fresh chilli compared with processed dried chilli.

This provides a high enough price gap where at harvest time because of abundant production, the price of red chilli being dropped to the detriment of farmers. Coupled with the bargaining position of farmers who are less strong in the market so that they are easily manipulated by the market price. No red chili sales system that clearly causing variation and a high enough price gap between one location to another. Just as when the harvest traders sometimes do not have the option to do delay the sale because they do not have enough technology to keep fresh chilli condition that no foul. So with such a limited time enough farmers will not be able to do deals with merchants as a result many of those who are disadvantaged by the market game. The advantage that should be enjoyed farmers instead it will be enjoyed by middlemen and traders.

With the auction system will form a healthy competition between traders to buy red chili at market prices and stable. On the other hand red chili auction system can be used to maintain the image and quality of Kulon Progo's commodity market. Before there is an auction system that mixes traders often found a nice red chili with a no good so the lower the image quality red chilli

market. Auction market system separates chilli products based on the quality and variety to maintain a good image in the market. Auction system carried out followed by a wholesaler who has registered at Farmers Market Association (Aspartan) chili. In Kulon Progo overall there are 25 units of the auction market.

In this closed auction system chili farmers in Kulon Progo trying to create resistance to conditions that endanger the existence of micro them. The condition in question is the market situation gives chili that had low bargaining power to farmers when the harvest. Tertup auction system so that it can be used as a micro resistance to withstand the competition highly competitive market. Besides micro resistance has become one of the ways to maintain the quality of food products from the threat of piracy. Where during chilli products with superior quality mixed with chili from the outside with the quality and lower prices, in order to gain more profits.

Systems covered by Aspartame auction conducted independently without any government interference in the process. This allows farmers to make a deal Aspartan rules adapted to the conditions they face. As said by Pirie, that "the world MIGHT be improved if there were less government involvement in the economic processes, less regulation, and less pre-emption of the funds the which people can allocate to Reviews their preferences".

5. Concluding Remarks

Micro-politics in small-scale farming in Indonesia can be used as a means of protection against local agricultural products from the market system is detrimental to farmers. Questioning the existence of small farmers especially in the micro politics of free markets may be one solution to build systems that adopt the locality and field dynamics. Thus helping small farmers to survive in an increasingly competitive system and complicated.

6. Bibliography

- Stephen B. Brush., (2005), Farmers' Rights And Protection Of Traditional Agricultural Knowledge, CAPRI Working Paper No. 36, International Food Policy Research Institute, pp. 25-29.
- Regine Andersen., (2005), The History of Farmers' Rights, The Fridtjof Nansen Institute.
- Smeed, Judy L. and Kimber, Megan and Millwater, Jan and Ehrich, Lisa C. (2009) Power over, with and through : another look at micropolitics. *Leading & Managing*, 15(1)., pp. 26-41
- Robinson, D.F. (2006) Governance and Micropolitics of Traditional Knowledge, Biodiversity and Intellectual Property in Thailand: Research Report. National Human Rights Commission of Thailand, Bangkok, UNSW and University of Sydney.
- Madsen Pirie. (1988). *Micropolitics*, Adam Smith Institute London, ISBN 0-7045 31-03-8, p. 74.